



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRIYANA, S.Sos. M.Si.**

Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ditanda tangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA PEKALONGAN



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID,
S.E., M.M.

Pekalongan, 5 Januari 2026
Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPPA Kota Pekalongan



SRIYANA, S.Sos., M.Si
NIP. 196807091990031008

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUJUAN				
1	Meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurunkan angka ketimpangan gender, serta meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak, dan kualitas pelayanan publik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	17,50 Persen	Formulasi : Anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan dibagi Dana kelurahan (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kelurahan) x 100 Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
		Indeks ketimpangan gender (IKG)	0.183 - 0.167 Indeks	Formulasi : Release dari BPS Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik Sumber data : BPS

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kategori kota layak anak	Kategori Nindya	Formulasi: Kategori penghargaan hasil evaluasi Kab/Kota Layak Anak pada tahun N yang diberikan oleh Kementerian PPPA Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik Sumber data : Kementerian PPPA
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD	98.33 Indeks	Formulasi :Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPPA tahun N Tipe capaian :Semakint inggi semakin baik Sumber data : Bagian Organisasi Setda
SASARAN STRATEGIS				
1	Meningkatnya Peran LKK Dalam Pembangunan	Persentase LKK yang aktif dalam pembangunan	100 Persen	Formulasi :Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan aktif dibagi Jumlah seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dikali 100

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik Sumber data :DPMPPA
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95.76 Indeks	Formulasi :Release dari BPS Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik Sumber data :BPS
3	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Persentase pendampingan pemenuhan hak anak (kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus)	100 Persen	Formulasi: Jumlah pendampingan pemenuhan hak anak dibagi jumlah total pendampingan pemenuhan hak anak (FA, PISA, Ponpes, PRA, SRA, RIRA, RBRA, PKA, DEKELA) dikali 100 Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik Sumber data :DPMPPA
4	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP OPD	83.57 Nilai	Formulasi : Nilai SAKIP DPMPPA tahun N

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kinerja Perangkat Daerah			Tipe capaian :Semakin tinggi semakin baik Sumber data :Inspektorat Daerah

Program	Anggaran	Keterangan
1. PenunjangUrusanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.357.894.000,00	APBD
2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 19.558.000,00	APBD
3. Perlindungan Perempuan	Rp. 145.752.000,00	APBD
4. PeningkatanKualitasKeluarga	Rp. 13.924.000,00	APBD
5. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 6.220.000,00	APBD
6. PerlindunganKhusus Anak	Rp. 315.119.000,00	APBD
7. PeningkatanKerja Sama Desa	Rp. 395.566.000,00	APBD

8. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 6.499.000,00	APBD
9. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 320.310.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.580.842.000,00	

Ditanda tangani secara elektronik oleh: WALI KOTA PEKALONGAN  H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.	Pekalongan, 5 Januari 2026 Ditanda tangani secara elektronik oleh: Kepala DPMPPA Kota Pekalongan  SRIYANA, S.Sos., M.Si NIP. 196807091990031008
---	--



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI NURTIYASIH, S.KM., M.Kes

Jabatan : Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRIYANA, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA



SRIYANA, S.Sos., M.Si.
NIP 19680709 199003 1 008

Pihak Pertama,
Sekretaris DPMPPA



TRI NURTIYASIH, S.KM., M.Kes
NIP 19750219 199903 2 003

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Targe t	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100,0 0 perse n	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi 2 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
		Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,0 0 perse n	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 2 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPA
		Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,0 0 perse n	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah + Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 1 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	11.547.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2.678.081.000,00	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	11.5356.000,00	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	485.347.000,00	APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	67.563.000,00	APBD
	Jumlah	Rp	3.357.894.000,00	

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala DPMPPA

Sekretaris DPMPPA



SRIYANA, S.Sos., M.Si.

TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes

NIP 19680709 199003 1 008

NIP 19750219 199903 2 003



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Perempuan dan Anak DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRIYANA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

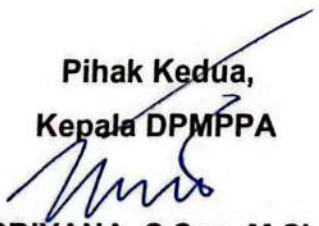
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

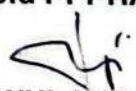
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Januari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA**


SRIYANA, S.Sos, M.Si.
NIP 19680709 199003 1 008

**Pihak Pertama,
Kabid PPPHAPPA**


ENDAH WULANDARI, S.Psi.
NIP 19800512 200501 2 020

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang teradvokasi PUG	14, 29 persen	Formulasi : Jumlah LKK yang teradvokasi PUG / Jumlah total LKK x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	18, 46 persen	Formulasi : (Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / jumlah penduduk perempuan) x 100.000 Tipe capaian : Semakin rendah semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Skor Kota Layak Anak	769,9	Formulasi : Skor Kota Layak Anak Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kementerian PPPA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus anak	Persentase Pengaduan Kasus Anak Yang Terlayani	100,00 persen	Formulasi : Jumlah pengaduan kasus kekerasan anak yang ditangani / jumlah kasus kekerasan anak yang masuk ke UPTD PPA x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
5	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Persentase Layanan Permasalahan Keluarga Yang Terlayani	100,00 persen	Formulasi : Jumlah permasalahan keluarga yang terlayani / jumlah pengaduan yang masuk ke puspa x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

- 1 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp 2.089.000,00 APBD
- 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp 17.469.000,00 APBD
- 3 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah kabupaten/ kota
Rp 16.014.000,00 DAK
- 4 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp 129.738.000,00 APBD dan DAK

5	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	13.924.000,00	APBD
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	6.220.000,00	APBD
7	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	87.885.000,00	DAK
8	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	157.210.000,00	APBD dan DAK
9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	70.024.000,00	APBD dan DAK
Jumlah		Rp	500.573.000,00	

Pekalongan, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala DPMPA

SRIYANA, S.Sos, M.Si.
NIP 19680709 199003 1 008

Pihak Pertama,
Kabid PPPHAPPA

ENDAH WULANDARI, S.Psi.
NIP 19800512 200501 2 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENI PURWANTI, S.STP.

Jabatan : Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRIYANA, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA

SRIYANA, S.Sos, M.Si
NIP 19680709 199003 1 008

Pihak Pertama,
Kabid Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat

ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Program :				
1	Meningkatnya kualitas kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat	Persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan Kelurahan	100 persen	Formulasi : Jumlah fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan dibagi jumlah target fasilitasi kerjasama TNI dan Kelurahan dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Meningkatnya kualitas administrasi Kelurahan	Persentase Kelurahan dengan kriteria *Cepat Berkembang*	100 persen	Formulasi : Jumlah Kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang" dibagi jumlah seluruh kelurahan yang ada dikali 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	100 persen	Formulasi : Jumlah Kelembagaan LKK yang terbina (7 LKK : LPM, BKM, PKK, Posyandu, RW, RT dan Karang Taruna) dibagi jumlah LKK (7 LKK : LPM, BKM, PKK, Posyandu, RW, RT dan Karang Taruna) yang ada dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Rp 395.250.000,00	APBD
2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 6.499.000,00	APBD
3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 320.310.000,00	APBD
Jumlah	Rp 722.059.000,00	

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA

Pihak Pertama,
Kabid Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat


SRIYANA, S.Sos, M.Si
NIP 19680709 199003 1 008


ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FASEHAH, S.H.

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes

Jabatan : Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris DPMPPA

TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes
NIP 19750219 199903 2 003

Pihak Pertama,
**Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan
Keuangan**

FASEHAH, S.H.
NIP 197702081996030 2 002

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah + Persentase capaian subkeg. Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD + Persentase capaian subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya administrasi keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian subkeg. penyediaan gaji dan tunjangan ASN + Persentase capaian subkeg Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dibagi 2 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Subkegiatan :				
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	Formulasi : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
5	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

	Subkegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	2.204.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	1.558.000,00	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	7.785.000,00	APBD

4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.676.637.000,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	1.444.000,00	APBD
	Jumlah	Rp	2.689.628.000,00	

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris DPMPPA



TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes
NIP 19750219 199903 2 003

Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan



FASEHAH, S.H.
NIP 19770208 199603 2 002



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI HARYANTO, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI NURTIYASIH, S.KM., M.Kes

Jabatan : Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris DPMPPA

TRI NURTIYASIH, S.KM., M.Kes
NIP. 19750219 199903 2 003

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

ANDI HARYANTO, SE
NIP. 19750620 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor + Persentase capaian sub keg. penyediaan bahan logistik kantor + Persentase capaian sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan + Persentase capaian sub keg. Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD dibagi 4 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa surat menyurat + Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik + Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan + Persentase capaian sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya + Persentase capaian sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarpras Gedung kantor atau bangunan lainnya dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 8,835,000	APBD
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 13,766,000	APBD
3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2,326,000	APBD

4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 90,429,000	APBD
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1,600,000	APBD
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 99,240,000	APBD
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 384,507,000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 45,847,000	APBD
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 14,471,000	APBD
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 7,245,000	APBD
Jumlah		Rp 668.266.000	

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Sekretaris DPMPPA



TRI NURTIYASIH, S.KM., M.Kes
NIP. 19750219 199903 2 003

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian



ANDI HARYANTO, SE
NIP. 19750620 199603 1 003



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI ANDAYANI, SE

Jabatan : Plt. Kepala UPTD PPA DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRIYANA, S. Sos, M, Si

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA DPMPPA
KOTA PEKALONGAN**

SRIYANA, S. Sos, M, Si
NIP 19680709 199003 1 008

Pihak Pertama,
**Plt. KEPALA UPTD PPA
DPMPPA KOTA PEKALONGAN**

DWI ANDAYANI, S.E.
NIP 197405292007012005

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

**Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Terlayannya Perempuan Korban Kekerasan secara terpadu dan komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani	100 persen	Formulasi : Jumlah perempuan (penduduk usia $\geq$ 18th) korban kekerasan yang ditangani dibagi Jumlah kasus kekerasan pada perempuan yang masuk ke UPTD PPA dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : UPTD PPA DPMPPA
2	Terlayannya Anak Korban Kekerasan secara terpadu dan komprehensif	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)	100 persen	Formulasi : Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi dengan Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : UPTD PPA DPMPPA

Sub kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 4.800.000,00	APBD
2	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 18.900.000,00	APBD
3	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 13.915.000,00	APBD
4	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 2.940.000,00	APBD
5	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 2.500.000,00	APBD
6	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 86.683.000,00	APBD
7	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 2.500.000,00	APBD
8	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 17.775.000,00	APBD
9	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 11.960.000,00	APBD
10	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 4.800.000,00	APBD
11	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 18.663.000,00	APBD
12	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 25.310.000,00	APBD

Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
13 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 76.202.000,00	APBD
Jumlah	Rp 2.869.48.000,00	

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DPMPPA Kota Pekalongan



SRIYANA, S. Sos, M, Si
NIP 19680709 199003 1 008

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA UPTD PPA
DPMPPA KOTA PEKALONGAN

DWI ANDAYANI, S.E.
NIP 197405292007012005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TISYA OKTRIADHANI, SE

Jabatan : Kepala UPTD PPA DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRIYANA, S. Sos, M, Si

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

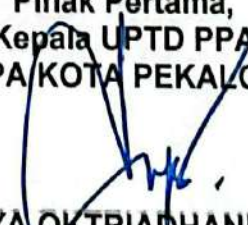
Pekalongan, 19 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA
KOTA PEKALONGAN



SRIYANA, S. Sos, M, Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Pihak Pertama,
Kepala UPTD PPA
DPMPPA/KOTA PEKALONGAN



TISYA OKTRIADHANI, SE
NIP. 19801018 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Terlayannya Perempuan Korban Kekerasan secara terpadu dan komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani	100%	Formulasi : Jumlah perempuan (penduduk usia > 18th) korban kekerasan yang ditangani dibagi Jumlah kasus kekerasan pada perempuan yang masuk ke UPTD PPA dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : UPTD PPA DPMPPA
2	Terlayannya Anak Korban Kekerasan secara terpadu dan komprehensif	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)	100%	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi dengan Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : UPTD PPA DPMPP

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan APBD
1. Layanan Gelar Kasus Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 4.800.000,00	APBD
2. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 18.900.000,00	APBD
3. Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 13.915.000,00	APBD
4. Layanan Medikolegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 2.940.000,00	APBD
5. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 2.500.000,00	APBD
6. Layanan Pendampingan Korban Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 86.683.000,00	APBD
7. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 2.500.000,00	APBD
8. Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 17.775.000,00	APBD
9. Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 11.960.000,00	APBD
10. Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 4.800.000,00	APBD
11. Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 18.663.000,00	APBD
12. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 25.316.000,00	APBD

13. Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat
Kabupaten/Kota Rp 76.202.000,00 APBD

Pekalongan, 19 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA
PEKALONGAN

SRIYANA, S. Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Pihak Pertama,
Kepala UPTD PPA
DPMPPA KOTA PEKALONGAN

TISYA OKTRIA DHANI, SE
NIP. 19801018 200604 2 011



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI ANDAYANI, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang P3HAP2A DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 5 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3HAP2A
DPMPPA KOTA PEKALONGAN**

**ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP. 198005122005012020**

**Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda
DPMPPA KOTA PEKALONGAN**

**DWI ANDAYANI, SE
NIP. 197405292007012005**

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan (dibagi) target kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan (dikali) 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya permasalahan keluarga yang terlayani	Persentase kasus permasalahan keluarga yang terlayani	100 persen	Formulasi : Jumlah kasus permasalahan keluarga yang ditangani (dibagi) jumlah permasalahan keluarga yang masuk ke PUSPAGA ELPePar (dikali) 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Tercapainya perangkat daerah yang didampingi pelaksanaan PUG secara komprehensif dan berkelanjutan	Persentase perangkat daerah yang didampingi pelaksanaan PUG	100 persen	Formulasi : Jumlah perangkat daerah yang didampingi pelaksanaan PUG (dibagi) Jumlah seluruh perangkat daerah (dikali) 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Teradvokasinya Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Mendapatkan Advokasi Pemberdayaan Perempuan	100 persen	Formulasi : Jumlah organisasi atau lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mendapatkan advokasi pemberdayaan perempuan (dibagi) jumlah target organisasi atau lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mendapatkan advokasi pemberdayaan perempuan (dikali) 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Sasaran Sub Kegiatan :

1	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP	4 Lembaga	Formulasi : Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Terlaksananya layanan konsultasi dan konseling keluarga Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	25 Orang	Formulasi : Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Terlaksananya Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik,	Jumlah lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan	50 orang	Formulasi : Jumlah lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	hukum, sosial, ekonomi bagi lembaga masyarakat dan perempuan	perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi		pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,

Kepala Bidang P3HAP2A

DPMPPA KOTA PEKALONGAN



ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP. 198005122005012020

Pihak Pertama,

Analisis Kebijakan Ahli Muda



DWI ANDAYANI, SE
NIP. 197405292007012005



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHARISMA EMA FATMA, S.Psi

Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan
Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 5 Januari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA, PPA
DPMPPA Kota Pekalongan**

ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP 19800512 200501 2 020

**Pihak Pertama,
Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan**

KHARISMA EMA FATMA, S.Psi
NIP 19960311 202012 2 026

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapai Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dibagi target kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Terlaksananya Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	Formulasi : Jumlah Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA, PPA
DPMPPA Kota Pekalongan


ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP 19800512 200501 2 020

Pihak Pertama,
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan


KHARISMA EMA FATMA, S.Psi
NIP 19960311 202012 2 026



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DYAH NASTITI, S.Sos

Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang PP, PHA dan PPA DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 5 Januari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA
DPMPPA Kota Pekalongan**

ENDAH WULANDARI, S.Psi

NIP. 19800512 200512 2 020

**Pihak Pertama,
Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan**

DYAH NASTITI, S.Sos

NIP. 19940923 202203 2 013

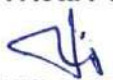
PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Perangkat Daerah yang Melaksanakan Dharma Wanita	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kegiatan Dharma Wanita	100 Persen	Formulasi : Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Dharma Wanita / jumlah Dharma Wanita) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
2	Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Ketercapaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 persen	Formulasi : Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus / jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Terlaksananya Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Pendampingan	1 lembaga	Formulasi : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Pendampingan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
2	Terlaksananya Bimtek Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimtek	250 orang	Formulasi : Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimtek Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA
DPMPPA Kota Pekalongan


ENDAH WULANDARI, S.Psi.
NIP. 19800512 200512 2 020

Pihak Pertama,
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan


DYAH NASTITI, S.Sos.
NIP. 19940923 202203 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESI LESTARI S.E.

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENI PURWANTI, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat DPMPPA Kota Pekalongan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan**

ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,

**Penelaah Teknis Kebijakan
DPMPPA Kota Pekalongan**

DESI LESTARI, S.E.
NIP 19891212 202012 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

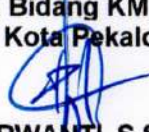
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan :				
1	Terfasilitasinya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Peningkatan Kapasitas	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas	14,29 persen	Formulasi : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	Formulasi : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan


ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan
DPMPPA Kota Pekalongan


DESI LESTARI, S.E.
NIP 19891212 202012 2 013



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIEFA RISYDIANA MAULIDA, S.IP

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARYANTO, S.E

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMPPA Kota Pekalongan

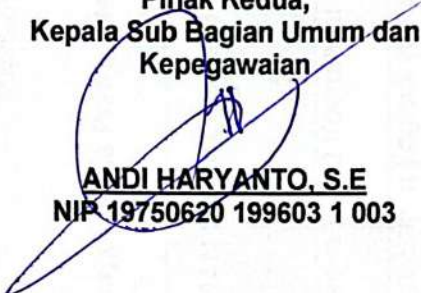
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian


ANDI HARYANTO, S.E
NIP 19750620 199603 1 003

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


ARIEFA RISYDIANA MAULIDA, S.IP
NIP 19891116 202012 2 012

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat/kegiatan yang difasilitasi	50 Kegiatan
2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan sesuai kebutuhan	4 Paket
3	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran sesuai ketentuan	12 Laporan
4	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tepat waktu tanpa tunggakan	12 Laporan
5	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Pelayanan sesuai kebutuhan	1 Paket

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


ANDI HARYANTO, S.E
NIP 19750620 199603 1 003

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


ARIEFA RISYDIANA MAULIDA, S.IP
NIP 19891116 202012 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ATINA KAMILA PRATIWI, S.Psi

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENI PURWANTI, S.STP.

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan**

ENI PURWANTI, S.STP

NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,

**Penelaah Teknis Kebijakan
DPMPPA Kota Pekalongan**

ATINA KAMILA PRATIWI, S.Psi.

NIP 19950430 202203 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kinerja Administrasi Kelurahan	100 persen	Formulasi : (jumlah kelurahan yang mengisi aplikasi epdeskel) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersusunnya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
2	Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

Pekalongan, 05 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan


ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan
DPMPPA Kota Pekalongan


ATINA KAMILA PRATIWI, S.Psi.
NIP 19950430 202203 2 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYA AYU PRAMITHA, A.Md.

Jabatan : Arsiparis Terampil

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARYANTO, SE

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

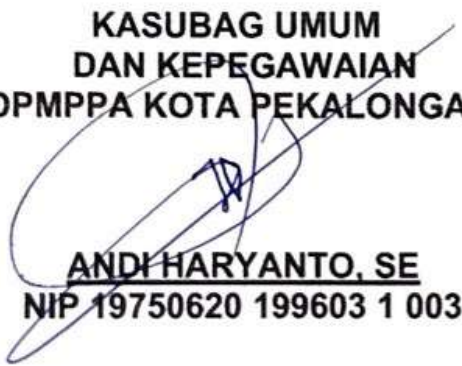
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KASUBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
DPMPPA KOTA PEKALONGAN**


ANDI HARYANTO, SE
NIP 19750620 199603 1 003

Pihak Pertama,
**ARSIPARIS TERAMPIL
DPMPPA KOTA PEKALONGAN**


DYA AYU PRAMITHA, A.Md
NIP 19970131 201903 2 002

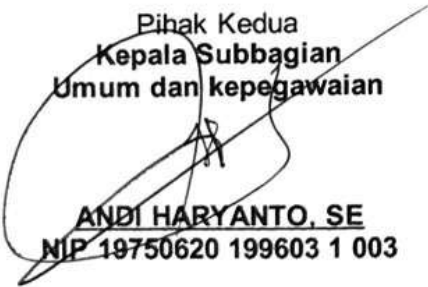
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya kegiatan penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip	Jumlah arsip naskah dinas/surat yang dibuat dan diterima	12 Daftar
2	Terlaksananya pemberkasan arsip aktif	Jumlah arsip aktif yang dilakukan pemberkasan	4 Daftar
3	Terlaksananya kegiatan pemindahan Arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dan inventarisasi arsip	Jumlah arsip inaktif yang dipindahkan	200 Berkas
4	Tersusunnya kegiatan administrasi kepegawaian seperti kenaikan gaji berkala	Jumlah dokumen kepegawaian yang tercipta	12 Dokumen

Pekalongan, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Subbagian
Umum dan kepegawaian


ANDI HARYANTO, SE
NIP 19750620 199603 1 003

Pihak Pertama
Arsiparis Terampil
DPMPPA Kota Pekalongan


DYA AYU PRAMITHA, A.Md
NIP 19970131 201903 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDA RIZA PRATIWI, S.E.

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama DPMPPA Kota
Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENI PURWANTI, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan**

ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,

**Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
DPMPPA Kota Pekalongan**

WINDA RIZA PRATIWI, S.E.
NIPPPK 19910102 202421 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan :				
1	Terfasilitasinya kerja sama TNI dan kelurahan	Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan	20 persen	Formulasi :Jumlah kumulatif Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan dibagi target fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan selama 5 (lima) tahun Renstra dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

Pekalongan, 05 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan


ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
DPMPPA Kota Pekalongan


WINDA RIZA PRATIWI, S.E.
NIPPPK 19910102 202421 2 008



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DITA RATRI ARNI, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA, PPA
DPMPPA Kota Pekalongan

ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP 19800512 200501 2 020

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Pertama
DPMPPA Kota Pekalongan

DITA RATRI ARNI, SE
NIP 19851012 202521 2 028

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya pendampingan pemenuhan Hak Anak secara optimal	Persentase ketercapaian pendampingan pemenuhan hak anak	100 persen	Formulasi : Jumlah Pendampingan Pemenuhan Hak Anak dibagi target pendampingan pemenuhan hak anak dikali 100. Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tertaksananya advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah).	1 Lembaga	Formulasi : Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah). Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik. Sumber Data : DPMPPA
2	Tertaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	Formulasi : Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota. Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik. Sumber Data : DPMPPA

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA, PPA
DPMPPA Kota Pekalongan


ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP 19800512 200501 2 020

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Pertatama
DPMPPA Kota Pekalongan


DITA RATNI ARNI, SE
NIP 19851012 202521 2 028



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROMADHON
Jabatan : Operator Layanan Operasional
DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARYANTO, S.E
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMPPA Kota Pekalongan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,

Kasubag Umum Dan Kepegawaian
DPMPPA Kota Pekalongan


ANDI HARYANTO, S.E.

NIP.19750620 199603 1 003

Pihak Pertama,

Operator Layanan Operasional
DPMPPA Kota Pekalongan


ROMADHON

NIP.19750514 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah hari pemeliharaan kendaraan dinas	240 Hari Kegiatan
2	Terlaksananya kegiatan mengemudi kendaraan dinas	Jumlah kegiatan mengemudi kendaraan dinas	240 Hari Kegiatan
3	Melaksanakan tugas caraka secara tepat waktu	Jumlah melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	12 Bulan

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubag Umum
dan Kepegawaian
DPMPPA Kota Pekalongan


ANDI HARYANTO, SE
NIP.19750620 199603 1 003

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional
DPMPPA Kota Pekalongan


ROMADHON
NIP 19750514 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HADY SASMITO
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
DPMPPA Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FASEHAH, S.H.
Jabatan : Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
DPMPPA Kota Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua

**Kasubag Perencanaan Evaluasi
dan Keuangan
DPMPPA Kota Pekalongan**

FASEHAH, S.H.
NIP 19770208 199603 2 002

Pihak Pertama

**Pengadministrasi Perkantoran
DPMPPA Kota Pekalongan**

HADY SASMITO
NIP. 19760111 201212 1 001

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengadministrasikan urusan gaji dan Tunjangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan	21 Orang
2	Mendokumentasikan surat / dokumen / berkas keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah berkas transaksi gaji dan tunjangan	12 berkas
3	Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah Pembuatan berkas transaksi Keuangan	1300 kali
4	Mengadministrasikan urusan bidang keuangan, dan mendokumentasikan surat / dokumen / berkas keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah Pembuatan pertanggungjawaban Laporan Keuangan	12 berkas

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas keuangan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah Pembuatan Laporan Keuangan	4 berkas
6	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah Pembuatan Laporan Penatausahaan Keuangan	12 berkas

Pekalongan, 05 Januari 2026

Pihak Kedua
**Kasubag Perencanaan Evaluasi
dan Keuangan**
DPMPPA Kota Pekalongan



FASEHAH, SH
NIP 19770208 199603 2 002

Pihak Pertama
**Pengadministrasi Perkantoran
DPMPPA Kota Pekalongan**



HADY SASMITO
NIP 19760111 201212 1 001



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZAM SLAMET

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARYANTO, SE

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPPA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 5 Januari 2026

**Pihak Kedua,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
DPMPPA**

ANDI HARYANTO, SE
NIP.19750620 199603 1 003

**Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran**

AZAM SLAMET
NIP.19830529 200901 1 009

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen/berkas bidang pengadministrasian umum yang di kelola	4 laporan
2	Tersedianya Peralatan dan Terlengkapan Kator	Jumlah surat/dokumen/berkas yang di kelompokkan bidang pengadministrasi umum menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	4 paket
3	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah surat/dokumen/berkas yang di kelompokkan bidang pengadministrasi umum menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	1 laporan
4	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah surat/dokumen/berkas bidang pengadministrasian umum yang di kelola	21 unit
5	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen, /laporan/berkas gedung kantor yang dikelola	1 laporan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPPA


ANDI HARYANTO, SE
NIP. 19750620 199603 1 003

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pengadministrasi Perkantoran


AZAM SLAMET
NIP. 19830529 200901 1 009



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL LATIFAH, S.H.

Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 5 Januari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA, PPA
DPMPPA Kota Pekalongan**

**ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP 19800512 200501 2 020**

**Pihak Pertama,
Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan**

**NURUL LATIFAH, S.H.
NIP 19990811 202504 2 003**

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Sub-kegiatan:				
1	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan atau penjangkauan korban tingkat daerah kab/kota	25 orang	Formulasi: Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan atau penjangkauan korban tingkat daerah kab/kota Tipe capaian: semakin tinggi semakin baik Sumber data: UPTD PPA DPMPPA
2	Tersedianya Layanan Pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban tingkat daerah kab/kota	25 orang	Formulasi: Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban tingkat daerah kab/kota Tipe capaian: semakin tinggi semakin baik Sumber data: UPTD PPA DPMPPA
3	Tersedianya Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan medikolegal tingkat daerah kab/kota	2 orang	Formulasi: Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan medikolegal tingkat daerah kab/kota Tipe capaian: semakin tinggi semakin baik Sumber data: UPTD PPA DPMPPA
4	Tersedianya Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus tingkat daerah kab/kota	25 orang	Formulasi: Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus tingkat daerah kab/kota Tipe capaian: semakin tinggi semakin baik Sumber data: UPTD PPA DPMPPA
5	Tersedianya Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak korban tingkat daerah kab/kota	10 orang	Formulasi: Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah kab/kota Tipe capaian: semakin tinggi semakin baik Sumber data: UPTD PPA DPMPPA

No	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Sub-kegiatan:				
6	Tersedianya Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan tenaga ahli tingkat daerah kab/kota	3 orang	Formulasi: Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan tenaga ahli tingkat daerah kab/kota Tipe capaian: semakin tinggi semakin baik Sumber data: UPTD PPA DPMPPA
7	Tersedianya Layanan Spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban tingkat daerah kab/kota	25 orang	Formulasi: Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik korban tingkat daerah kab/kota Tipe capaian: semakin tinggi semakin baik Sumber data: UPTD PPA DPMPPA

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA, PPA
DPMPPA Kota Pekalongan**



ENDAH WULANDARI, S.Psi.
NIP 19800512 200501 2 020

Pekalongan, 5 Januari 2026
Pihak Pertama,
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan



NURUL LATIFAH, S.H.
NIP 19990811 202504 2 003



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GHEMA RHEFORMASIA PERTIWI, S.Tr.Sos

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA, PPA
DPMPPA Kota Pekalongan

ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP 19800512 200501 2 020

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Pertama
DPMPPA Kota Pekalongan

GHEMA RHEFORMASIA PERTIWI, S.Tr.Sos
NIP 19980706 202504 2 004

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2026

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kabupaten/Kota	25 Orang	Formulasi : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik. Sumber Data : UPTD PPA DPMPPA
2	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	3 Orang	Formulasi : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan tenaga ahli Tingkat Kab/Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik. Sumber Data : UPTD PPA DPMPPA
3	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	6 Orang	Formulasi : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik. Sumber Data : UPTD PPA DPMPPA
4	Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	3 Orang	Formulasi : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik. Sumber Data : UPTD PPA DPMPPA
5	Tersedianya layanan pengaduan atau penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pengaduan atau penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	25 Orang	Formulasi : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pengaduan atau penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik. Sumber Data : UPTD PPA DPMPPA
6	Tersedianya layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kab/Kota	25 Orang	Formulasi : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kab/Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik. Sumber Data : UPTD PPA DPMPPA

Pekalongan, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang PP, PHA, PRA
DPMPPA Kota Pekalongan


ENDAH WULANDARI, S.Psi
19800512 200501 2 020

Pihak Pertama,
Pekerja Sosial Ahli Pertama
DPMPPA Kota Pekalongan


GHEMA RHEFORMASIA PERTIWI, S.Tr.Sos
19980706 202504 2 004